

**PROGRAM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LABUHAJATU UTARA**

Oleh:

Simon Beni Arianto Purba

Email : simon.purba1991@yahoo.com

Dibimbing oleh Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

PAD (Local Own-Source Revenue) Enhancement so depends on potention owned by an area. One of the attempt that can be used to increase PAD is by increasing local tax excavation and area retribution of Government City/Regency as optimal as possible. Therefore, it requires the efforts to increase Local Own-Source Revenue through establishment of local finance development management enhancement program. To know intensification and ekstensification program conducted by Department of Finance Management Income and Local Asset of North Labuhanbatu Regency in increasng PAD. Where The regency of North Labuhanbatu had been able to increase PAD in every year since 2008 this area was raised.

This research was conducted in North Labuhanbatu Regency, precisely Department of Finance Management Income and Local Asset, where the informan of this research was the Leader of Department of Finance Management Income and Local Asset, also Head of Income Division Department of Finance Management Income and Local Asset. Sampling method by using purposive sampling. In data collection was used field reasearch method, interview, observation, study of literature and documentation. Gathered data then analyzed by using qualitative descriptive analysis.

After the research conducted, found that the implementation of Department of Finance Management Income and Local Asset program in increasing PAD North Labuhanbatu Regency had done well and had been able to increase PAD of North Labuhanbatu Regency every year, but it was not maximal yet due to the existence of troubles faced in running the program i.e., Human Resources, People Awareness, and Infrastructure.

Key words : Program, PAD Enhancement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya keuangan, faktor sarana dan prasarana dan faktor organisasi dan manajemen pemerintahan. Dari faktor-faktor tersebut, yang menjadi lingkup penelitian adalah faktor sumber daya keuangan dengan melihat pada kemampuan suatu daerah untuk mengatur, mengurus, dan membiayai urusan rumah tangganya, karena salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan daerah mengelola sumber daya keuangan daerah. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Sementara disisi lain, saat ini kemampuan keuangan sebagian besar Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan Negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah yang valid sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah yang ada serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang valid dapat memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan/strategi dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan pendapatan daerah yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan meminimalisir penambahan beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang penting peranannya yaitu sebagai perwujudan kemampuan suatu daerah

dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka arah pengelolaan Pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan potensi yang ada.
- b. Menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dengan tetap meminimalisir meningkatnya pembebanan kepada masyarakat.
- c. Pengelolaan administrasi penerimaan dilakukan secara benar, bertanggung jawab dan profesional.
- d. Pemanfaatan asset daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah secara optimal.
- e. Sesuai dengan prinsip disiplin anggaran maka pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk semua sumber pendapatan.
- f. Peninjauan kembali peraturan daerah atau ketentuan pelaksanaannya tentang pajak dan retribusi daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pemahaman tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan kejelasan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena dengan pemahaman yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya bila pemahaman yang keliru maka pemberian otonomi akan menambah beban daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri yang digali dari potensi

daerah. Ini artinya pendapatan yang digali dari potensi daerah, dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar dalam APBD yang dapat mendukung pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa dana perimbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD tahun sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan berbeda dengan daerah yang lainnya, rendahnya PAD pada suatu daerah otonomi merupakan indikasi nyata dimana masih besarnya ketergantungan daerah tersebut kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan disamping rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut, untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara merata pada daerah tersebut.

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dengan Ibu Kota Aek Kanopan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara di karenakan terlalu luasnya wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Sebelum pemekaran Kabupaten Labuhanbatu memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan merupakan daerah yang terluas di Provinsi Sumatera Utara dengan 22 Kecamatan. Tujuan pemekaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengolahan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memacu perkembangan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada khususnya. Disamping itu, mewujudkan berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara juga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan lain yaitu bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan terbentuknya pemekaran Kabupaten maka

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara membentuk beberapa badan /dinas. Salah satu badan/dinas yang sangat berpengaruh pada daerah pemekaran adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan berbagai upaya peningkatan sumber daya keuangan daerah, salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mulai Januari – September 2010 tercatat senilai Rp. 3,179 miliar atau 61,9% dari target Rp. 5,137 miliar, jika dibandingkan dengan PAD pada tahun 2009, yang ditargetkan Rp.5,060 miliar dan yang terealisasi Rp.2,795 miliar, ternyata PAD untuk tahun 2010 hingga bulan September meningkat menjadi Rp.3,179 miliar.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara bertanggung jawab penuh atas peningkatan pendapatan asli daerahnya. Sampai saat ini pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah berjalan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya saja masih belum maksimal dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan realisasi anggaran pendapatan Kabupaten

N o	URAIAN	TARGE T	REALIS ASI	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	7.860.000.000,00	7.339.420.000,00	93,37
2	Retribusi Daerah		65,00	81,43
3	Lain-lain PAD Yang Sah	7.839.120.000,00	6.384.099.680,00	134,21
		3.909.806.217,00	5.247.596.773,87	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	19.608.926.217,00	18.971.165.188,7	96,74

Labuhanbatu Utara (Labura) yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) telah meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Selain Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) harus melakukan program dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta dibutuhkan kesadaran masyarakat dan para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak guna membantu

N o	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	5.822.025.630,00	6.256.175.865,00	107,46
2	Retribusi Daerah	1.264.000.000,00	1.244.965.562,00	98,49
3	Lain-lain PAD Yang Sah	2.060.000.000,00	3.017.108.752,00	146,46
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	9.146.025.630,00	10.518.250.179,00	115,00

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, karena itu adalah salah satu kendala pemerintah dalam menjalankan program peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berikut dapat kita lihat laporan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2011-2013 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 (dalam rupiah)

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tabel I.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tabel I.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 (dalam rupiah)

N o	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	13.586.448.380,00	13.303.470.022,00	97,92
2	Retribusi Daerah			
3	Lain-lain PAD Yang Sah	9.003.309.642,00	6.747.039.955,00	74,94
		3.135.000.000,00	5.600.789.880,90	178,65
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	25.724.758.022,00	25.651.299.857,90	99,71

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dari tabel 1.1 sampai tabel 1.3 dapat dijelaskan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp.25.651.299.857,90** atau mencapai

99,71% dari anggaran sebesar **Rp.25.724.758.022,00**. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp.18.971.116.518,87** atau mencapai **96,74%** dari anggaran sebesar **Rp. 19.608.926.217,00** realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2013 meningkat sebesar **Rp.6.680.183.339,03** atau **35,21%**. Dibandingkan lagi dengan realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2011 telah meningkat bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan.

Mencermati masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan program peningkatan PAD karena besarnya kemampuan keuangan daerah serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang meningkat hampir setiap tahunnya, maka penulis mencoba mengkaji lebih dalam yang berjudul **“Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terlaksana.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan Program yang diterapkan oleh Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu administrasi publik khususnya manajemen strategi.
- b. Sebagai rekomendasi bagi peneliti lain yang melakukan kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pihak-pihak yang terkait, sebagai masukan/rekomendasi terhadap para pengambil kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. KONSEP TEORI

1. Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “program artinya rancangan mengenai azas serta usaha yang dilaksanakan. Program dapat dikatakan sebagai sebuah rencana yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan meski tidak semuanya bisa direalisasikan. Sebuah program besar dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha untuk mencapai sasaran yang akan ditetapkan. KBBI (2009:2).

Charles O Jones dalam bukunya *public Policy* menjelaskan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas,

langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu.

Program ini biasanya dijabarkan atau dirinci dalam sebuah proyek-proyek dan didukung oleh anggaran. Namun sebaik apapun program tanpa ada implementasi mustahil sasaran dan tujuan-tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Implementasi berarti penerapan pelaksanaan, karena itu implementasi kebijakan berupa program merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan.

Sedangkan **Ria Dina** dalam **Sri Kadarini (2011:16)** mengatakan bahwa program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menggambarkan dan menganalisis program terdapat bagian-bagian pokok yang harus ada, yaitu : masukan, komponen, implementasi kerja dilapangan.

Sebagaimana diketahui bahwa program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. (**Ismail Namawi, 2007:174**)

Dalam menggambarkan dan menganalisis program terdapat bagian-bagian pokok yang harus ada, yaitu : inputs, komponen, implementasi kerja di lapangan, bentuk-bentuk hubungan antar lini, outcomes (**Muhammad Afrizal dalam Wirawan 2012 : 26**)

- Inputs : adalah sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan program, contoh, dana, SDM, Sarana, Fasilitas

Pendukung, pengetahuan, dll

- Komponen : kelompok aktif dalam program
- Implementasi kerja atau pelaksanaan : contoh modal untuk menilai kebutuhan pelatihan bagi peserta, skill department untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil.
- Bentuk-bentuk hubungan antar lini : maksudnya adalah inventarisir faktor-faktor apa saja yang bisa menjembatani antara outputs dari suatu program dengan outcomes.
- Outcomes : sebanyak mungkin outputs program diterima masyarakat pada semua sektor.

Dari beberapa teori program diatas penulis mengambil teori dari (**Muhammad Afrizal dalam Wirawan 2012 : 26**) mengemukakan ada 5 tugas andalan yang patut dikuasai oleh setiap organisasi agar dapat memandu langkah program yang dilakukan organisasi.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar program berjalan dengan baik

1. Faktor dari sektor publik merupakan hal-hal yang langsung berkaitan dengan program, yaitu meliputi :
 - Program lain yang juga sejenis dengan program yang diadakan
 - Kebijakan pimpinan, apapun kebijakan pimpinan harus tetap menjadi perhatian ketika merencanakan sebuah program
 - Departemen lain, dalam sebuah organisasi kerja sama dengan departemen lain mutlak diperlukan untuk memperlancar

jalannya sebuah program. Apalagi departemen itu menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah program.

- Harapan dari penyandang dana untuk mendanai adanya program yang dimaksud
 - Pemilihan team kerja, penting diperhatikan agar program berjalan dengan baik
 - Adanya undang-undang kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi perubahan kebijakan
 - Keputusan pengadilan terkait dengan rencana jangka panjang dari program yang sedang digarap.
2. Sektor masyarakat, pada sektor ini masyarakat perlu mendapatkan perhatian pada analisis kebutuhan pengguna agar program tidak sia-sia maka faktor ini penting juga diperhatikan. Yang kedua adalah kecenderungan arah organisasi karena mengikuti arah perubahan dan yang tak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian adalah media massa.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan dan menggambarkan dengan jelas

bagaimana program DPPKAD dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara

3. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam menentukan sample penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, artinya penentuan sample dengan pertimbangan tertentu yaitu informan memiliki informasi sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang dimaksud disini adalah pihak-pihak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Keterangan ini diperoleh dari staff Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain :

- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Masyarakat

4. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bukti fisik yang berkaitan dengan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 2) Tanggapan/hasil wawancara peneliti dengan para *key informan* yang telah peneliti wawancara guna memperoleh informasi yang dibutuhkan bagi peneliti ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 4 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Rencana Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 3) Data yang bersumber dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini serta sumber-sumber lainnya, seperti dokumentasi, arsip, serta data-data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan, dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta mengenai strategi peningkatan PAD.
- b) Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab terhadap informan guna memperoleh data mengenai strategi peningkatan PAD.
- c) Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi.

6. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dari instansi terkait dan sumber-sumber lain. Kemudian data-data tersebut dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau digambarkan sesuai dengan kenyataan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan asas desentralisasi, kewenangan yang luas dan bertanggung jawab diberikan kepada daerah, yang secara langsung diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. maksud dari kebijakan desentralisasi adalah pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur sendiri wilayah pemerintahannya. Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonomi. Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan Pengetahuan Dalam Penatalaksanaan Administrasi
Kebijakan ini bertujuan untuk peningkatan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian, dalam hal ini

program administrasi perkantoran telah terpenuhi sesuai dengan sasaran dan pencapaian yang telah direncanakan, yaitu dengan mengirimkan pegawai/aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis, kursus dan pelatihan operator consult (OC), pelatihan pendataan dan penilaian PBB yang dilaksanakan pemerintah maupun lembaga lainnya. Dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah program ini cukup berpengaruh, dikarenakan ini adalah program awal agar para aparatur yang bertugas dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

- Meningkatkan Profesionalisme, Integritas Aparatur Kekayaan Daerah

Kebijakan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap para pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara agar para pegawai bisa bekerja lebih profesional dalam bekerja khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. pelaksanaan program ini telah terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan dimana para pegawai/aparatur telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kontribusinya adalah agar pelayanan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi bisa berjalan dengan baik dan lebih profesional.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kebijakan program ini adalah menambah sarana dan prasarana kegiatan kantor agar dapat menunjang kegiatan operasional kantor yang memadai, program ini sangat penting dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar dapat membuat laporan dan evaluasi dasar penyampaian hasil kegiatan dengan baik, namun hal ini peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang bertujuan untuk menambah sarana dan prasarana kegiatan kantor masih belum terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana, sehingga penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini harus dilakukan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai agar dalam pelaksanaan program peningkatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilakukan dengan maksimal, dengan menyediakan sarana dan prasarana diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional kantor yang memadai. Namun dalam pelaksanaan program peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara petugas yang bertugas dilapangan yang membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mau membayar wajib pajak dan wajib retribusi tetap berjalan dengan baik walaupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang memadai, hal ini berdasarkan tanggapan dari informan penelitian

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Membuat laporan dan evaluasi dasar penyampaian hasil kegiatan adalah kebijakan dari program ini agar dapat terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Dalam program ini tentu sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sangat diperlukan sistem laporan capaian kinerja untuk dapat melakukan laporan

keuangan dengan baik dan tepat pada waktunya. Program ini telah terlaksana sesuai dengan rencana, sehingga penyusunan dan penyampaian laporan dapat dilaksanakan tepat waktu. Hal ini berdasarkan tanggapan dari informan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ini telah membantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, dengan berjalannya program ini dapat membantu penyusunan dan penyampaian laporan dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga dapat membantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program yang paling utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun kebijakan dalam program ini adalah :

- Monitoring langsung ke objek PAD dan PBB
- Pendekatan langsung kepada objek PAD dan PBB yang memiliki potensi untuk ditingkatkan volume pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Efisiensi tata cara penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat
- Melibatkan semua kepala seksi pendapatan di seluruh kecamatan untuk menjaring wajib pajak/wajib retribusi.
- Menetapkan langsung di lapangan terhadap wajib pajak, retribusi bila diperlukan.
- Toleransi dan disconisasi bagi objek pajak/retribusi yang mentaati waktu

pembayaran/pelunasan
pajak/retribusi

Adapun sasaran dari kebijakan ini adalah intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak/retribusi daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara keseluruhan program ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan melakukan monitoring langsung ke objek PAD dan PBB, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi lebih baik.

Pendekatan langsung kepada objek PAD dan PBB yang memiliki potensi untuk dapat meningkatkan volume pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Efisiensi tata cara penagihan pajak daerah dan retribusi daerah juga telah dilakukan oleh DPPKAD Labuhanbatu Utara dengan cara melakukan pelatihan khusus kepada para pegawai/aparatur yang akan diterjukan ke lapangan sehingga terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar pendapatan asli daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Melibatkan semua Kepala Seksi Pendapatan DPPKAD di seluruh kecamatan untuk dapat menjaring para wajib pajak dan wajib retribusi agar dapat membayar pajak tepat waktu dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, petugas/aparatur juga menetapkan langsung di lapangan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi dilapangan bila sewaktu-waktu diperlukan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah juga memberikan toleransi dan disconisasi bagi para wajib pajak dan wajib retribusi yang mentaati waktu pembayaran, pelunasan pajak dan retribusi.

Selain itu DPPKAD juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan izin dan pengawasan yang berguna untuk peningkatan penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak dan dana non pajak, dana alokasi umum, dana

alokasi khusus, dan pengembaliannya serta dana kontinjensi. Dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait setiap tahunnya telah terjadi peningkatan penerimaan daerah yang semakin meningkat yang berarti program ini sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Meningkatkan pengetahuan teknis administrasi barang secara profesional juga termasuk dalam kebijakan program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan pemahaman pemegang kas, bendaharawan barang dan pengurus barang dalam administrasi pengelolaan kekayaan daerah dan inventaris asset daerah. kebijakan ini telah terlaksana dengan baik walaupun penatausahaan administrasi barang masih dilakukan secara manual, dan pada tahun anggaran berikutnya akan dilakukan penatausahaan administrasi barang melalui komputerisasi (*wawancara dengan Ibu Eti Arnida Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD 09 Juli 2014*)

Terlaksananya penyusunan rencana anggaran satuan kerja berbasis kinerja untuk seluruh unit pengguna anggaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sasaran dari Program ini. Kebijakan yang dilakukan adalah agar petugas/aparatur mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap anggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya adalah Pengelolaan gaji PNS yang profesional dan akuntabel dilakukan agar terwujudnya penggajian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu, pengelolaan gaji dilakukan melalui sistem komputerisasi secara terpadu dengan menerapkan aplikasi simda sehingga dapat terwujudnya penggajian yang tepat waktu.

Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya di bidang pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat

dilihat dari sejauh mana program yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap program bidang pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat dari inputs, komponen, implementasi kerja di lapangan, bentuk-bentuk hubungan antar lini, dan outcomes (**Muhammad Afrizal dalam Wirawan 2012 : 26**) pada penjabaran berikut ini :

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura)

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi program DPPKAD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara :

1. Sumber Daya Manusia

Sebagai daerah pemekaran yang baru berusia 6 tahun pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai kendala, Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi program DPPKAD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara, kurang berkualitasknya sumber daya manusia yang membidangi pendapatan membuat program yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan program dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga setiap pekerjaan

dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam program pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini dapat menyebabkan program yang dilakukan bidang pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi mengenai faktor sumber daya manusia :

“kekurangan sumber daya manusia aparatur yang memahami dan menguasai bidang pendapatan, masih menjadi faktor utama berjalannya program tidak maksimal”(**hasil wawancara dengan Bapak Khairul, 27 November 2014**)

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program DPPKAD khususnya bidang pendapatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sumber daya manusia yang ada masih kurang terutama aparatur yang ahli dibidangnya, hal ini menyebabkan program pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak maksimal.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Belum terpenuhinya secara keseluruhan sarana dan prasarana karena keterbatasan dana, juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sehingga penyediaan sarana dan prasarana perkantoran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang

Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur :

Belum terpenuhinya secara keseluruhan sarana dan prasarana karena keterbatasan dana, membuat penyediaan sarana perkantoran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia(**hasil wawancara dengan Ibu Eti Arnida, 09 Juli 2014**)

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan program pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi tidak maksimal, dalam pelaksanaan program pendapatan asli daerah dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat membayar wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membayar pajak.

Dalam program peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara, kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak menjadi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak :

“kendala-kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan program peningkatan pendapatan asli daerah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak, padahal sudah diberikan sosialisasi dari

*aparatur bidang pendapatan “
(hasil wawancara dengan
Bapak Khairul, 27 November
2014)*

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya di bidang pendapatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara masuk dalam kategori baik, karena program yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara secara keseluruhan telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan khususnya di bidang pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu :
 - a. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang kurang berkualitas mempengaruhi program bidang pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara, kurangnya pengetahuan petugas/aparatur terhadap program pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara ini membuat program yang dilakukan belum maksimal. Seperti masih banyaknya pegawai yang tamatan SMA sehingga tenaga ahli yang berkualitas dalam program peningkatan pendapatan asli daerah masih sedikit.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur
Belum terpenuhinya secara keseluruhan sarana dan prasarana

aparatur dikarenakan keterbatasan dana menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat membuat program yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan program peningkatan pendapatan asli daerah menjadi tidak maksimal, dalam program yang dibuat bidang pendapatan daerah masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak, padahal sudah diberikan sosialisai oleh bidang pendapatan tentang pendapatan asli daerah, selain itu juga masyarakat juga telah mengetahui program pendapatan daerah melalui undangan langsung dari DPPKAD, dan melalui spanduk atau baliho yang dibuat oleh bidang pendapatan, hal inilah yang membuat program pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum maksimal.

SARAN

1. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dalam hal ini Program peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dapat melakukan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah khususnya bidang pendapatan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah, serta mengirimkan aparatur ke luar daerah untuk pelatihan dan studi banding sebagai referensi untuk dapat meningkatkan pemahaman sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.

2. Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak, sehingga program dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan dapat berjalan dengan apa yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. CV. Bandung : Alfabeta

Chaled Pheni. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta : Edisi Nasional RI. 2005

Charles O. Jones pengantar kebijakan public rajawali : Jakarta

Halim, Abdul. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : AMP YKPN. 2004

Muhammad Afrizal, Wirawan 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Namawi, Ismail. 2007. *Public policy*. Surabaya : Pmn

Penerbit Alaf Riau. Pekanbaru

Prajudi, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Sri Kadarini, Ria Dina. 2011. *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Partisipasi Ria Di Uptd Pemberdayaan Suka Jadi BPPMKB Kota Pekanbaru*. Skripsi. Unri Pekanbaru.

Sujianto, 2008. *Implementasi kebijakan public “konsep teori dan praktik”*

Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*, Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Joko 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media

Dokumen

Kamus besar bahasa Indonesia

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Perda Kabupaten Lanuhanbatu Utara Nomor. 4 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.